

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

UPPD atau Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah merupakan salah satu unit kerja di bawah BAPENDA yang berfokus pada pengelolaan pendapatan daerah, khususnya pada sektor pajak. Jenis pajak yang dikelola oleh UPPD meliputi pajak air permukaan, retribusi daerah, pajak kendaraan bermotor, serta bea balik nama kendaraan bermotor. Penelitian yang berjudul Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan objek penelitiannya terfokus pada wajib kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor UPPD/Samsat Kota Semarang II yang beralamat di Jalan Setia Budi No. 110, Sumurboto, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah 50269. Wilayah yang menjadi cakupan dari Kantor Samsat Semarang I terdiri dari lima kecamatan, meliputi:

1. Kecamatan Tembalang
2. Kecamatan Banyumanik
3. Kecamatan Candisari
4. Kecamatan Semarang Selatan
5. Kecamatan Gajah Mungkur

SAMSAT atau Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap, merupakan lembaga yang menangani proses administrasi terkait transaksi kendaraan bermotor. Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Jawa Tengah bertugas memungut

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB). Selain itu, PT Jasa Raharja bertanggung jawab atas pengelolaan sumbangan wajib untuk dana kecelakaan lalu lintas, sementara Kepolisian Lalu Lintas Daerah berperan dalam mengidentifikasi kelayakan serta kepemilikan kendaraan.

4.2 Deskripsi Data Responden

Penelitian ini menggunakan responden Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Samsat Kota Semarang II dengan jumlah sampel 100 responden. Setiap responden menjawab sejumlah pertanyaan. Data responden mencakup beberapa aspek meliputi nama, jenis kelamin, usia, pekerjaan dan jenis kendaraan. Pengumpulan sampel dilakukan dengan membagikan kuesioner secara langsung kepada wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Samsat Kota Semarang II.

4.2.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Data dikumpulkan dari 100 wajib pajak yang menjadi responden di Kantor Kota Semarang II. Berdasarkan jenis kelamin, responden dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu pria dan wanita. Hasil pengelompokan tersebut menghasilkan data dengan total persentase 100% sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
1	Pria	57	57%
2	Wanita	53	53%
TOTAL		100	100%

Sumber : Olah data penulis, 2025

Berdasarkan tabel di atas, dari total responden yang diklasifikasikan menurut jenis kelamin, tercatat sebanyak 57 responden berjenis kelamin pria atau sebesar 57% dan 53 responden berjenis kelamin wanita atau sebesar 53%. Hasil ini menunjukkan bahwa responden pria lebih dominan dalam pengisian kuesioner pada penelitian ini.

4.2.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Penelitian ini melibatkan 100 responden yang dikelompokkan berdasarkan rentang usia. Adapun data yang diperoleh dari pengelompokkan tersebut disajikan sebagai berikut:

Tabel 4. 2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

No	Usia	Frekuensi	Persentase
1	<25 Tahun	18	18%
2	25 – 35 Tahun	41	41%
3	36 – 45 Tahun	15	15%
4	>45 Tahun	26	26%
TOTAL		100	100%

Sumber: Olah data penulis, 2025

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa karakteristik responden berdasarkan usia terdiri dari:

Sebanyak 18 responden berusia < 25 tahun, 41 responden dengan usia 25 – 35 tahun, 15 responden berusia 36 – 45 tahun, dan 26 responden berusia > 45 tahun.

Dapat dilihat dari data di atas bahwa usia antara 25 – 35 tahun dengan jumlah 41 dan persentase sebanyak 41%. Karakteristik ini menggambarkan jumlah wajib pajak dalam kelompok usia tertentu yang melakukan pembayaran pajak pada suatu waktu dan tempat secara bersamaan.

4.2.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

Penelitian ini melibatkan 100 wajib pajak sebagai responden di Kantor Samsat Kota Semarang II. Pengisian kuesioner dilakukan berdasarkan kategori pekerjaan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4. 3 Karakteristik Berdasarkan Pekerjaan

No	Pekerjaan	Frekuensi	Persentase
1	TNI / Polri	4	4%
2	Pegawai Negeri Sipil	15	15%
3	Wiraswasta	14	14%
4	Pegawai Swasta	23	23%
5	Pelajar / Mahasiswa	11	11%
6	Lainnya	33	33%
TOTAL		100	100%

Sumber : Olah data penulis, 2025

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa responden yang bekerja dengan latar belakang lainnya seperti buruh, dosen, wirausaha, pendeta, ibu rumah tangga, dan pegawai BUMN merupakan kelompok dominan dalam pengisian kuesioner, yaitu sebanyak 33 orang atau 33%.

4.2.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kendaraan

Penelitian ini melibatkan 100 wajib pajak sebagai responden yang terdaftar di Kantor Samsat Kota Semarang II. Pengisian kuesioner dilakukan berdasarkan kategori pekerjaan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4. 4 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kendaraan

No	Jenis Kendaraan	Frekuensi	Persentase
1	Kendaraan Roda Dua	82	82%
2	Kendaraan Roda Empat	18	18%
Total		100	100%

Sumber : Olah data penulis, 2025

Data tersebut, menunjukkan bahwa dari 100 responden yang menjadi wajib pajak, mayoritas membayarkan pajak kendaraan bermotor roda dua, yakni sebanyak 82 responden atau sebesar 82%. Hal ini mencerminkan peningkatan yang cukup signifikan mengenai jumlah kendaraan roda dua dari tahun ke tahun.

4.3 Analisis Data

4.3.1 Uji Instrumen Penelitian

1. Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana setiap pertanyaan mampu mengukur variable pada penelitian ini. Suatu indikator dinyatakan valid apabila nilai r hitung lebih besar dari r tabel (r hitung $>$ r tabel). Sebaliknya, jika r hitung lebih kecil dari r tabel (r hitung $<$ r tabel), maka indikator tersebut dianggap tidak valid. Dalam penelitian ini, jumlah responden adalah 100 orang, sehingga nilai $N = 100$, maka diperoleh *degree of freedom* (dF) adalah $100 - 2 = 98$. Dapat dilihat berdasarkan tabel distribusi dengan nilai r signifikansi 0,05, maka dF sebesar 0,1966. Berikut ini disajikan tabel hasil uji validitas data penelitian:

Tabel 4. 5 Uji Validitas

Variabel	Item	r hitung	R tabel	Hasil
Pengetahuan Wajib Pajak	X1.1	0,757	0,197	Valid
	X1.2	0,793	0,197	Valid
	X1.3	0,792	0,197	Valid
	X1.4	0,795	0,197	Valid
	X1.5	0,689	0,197	Valid
Kesadaran Wajib Pajak	X2.1	0,799	0,197	Valid
	X2.2	0,818	0,197	Valid
	X2.3	0,757	0,197	Valid
	X2.4	0,750	0,197	Valid
	X2.5	0,769	0,197	Valid
Sanksi Pajak	X3.1	0,803	0,197	Valid
	X3.2	0,808	0,197	Valid
	X3.3	0,761	0,197	Valid
	X3.4	0,611	0,197	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak	Y.1	0,703	0,197	Valid
	Y.2	0,765	0,197	Valid
	Y.3	0,676	0,197	Valid
	Y.4	0,716	0,197	Valid
	Y.5	0,723	0,197	Valid

Sumber: Data primer diolah SPSS 26, 2025

Berdasarkan hasil uji validitas yang ditampilkan pada tabel di atas, menunjukkan bahwa seluruh item pertanyaan dari masing-masing variabel dinyatakan valid. Hal ini ditunjukkan oleh nilai r hitung yang lebih besar daripada r tabel (0,1996 yang dibulatkan menjadi 0,197). Dengan demikian, seluruh indikator pada keempat variabel penelitian memenuhi syarat validitas dan dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut pada tahap uji berikutnya.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas bertujuan untuk mengetahui apakah indikator yang digunakan dalam kuesioner sudah reabel untuk digunakan sebagai pengumpulan data. Instrumen dikatakan reabel apabila jawaban responden konsisten, baik dilihat dari waktu maupun tempat pengisian. Dengan kata lain, uji reliabilitas

menilai apakah setiap indikator mampu memberikan hasil yang stabil dan dapat dipercaya dalam proses pengumpulan data.

Tabel 4. 6 Uji Reliabilitas

Realibility Statistics			
Variabel	Cronbach's Statistics	Nilai	Hasil
Pengetahuan Wajib Pajak	0,811	0,6	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak	0,819	0,6	Reliabel
Sanksi Pajak	0,712	0,6	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,748	0,6	Reliabel

Sumber: Data primer diolah SPSS 26, 2025

Uji Reliabilitas dikatakan reliabel apabila *indicator variable* menunjukkan angka diatas 0,6 atau *indicator variable* $> 0,6$. Berdasarkan hasil uji reliabilitas yang disajikan pada tabel di atas, baik variabel dependen (Y) maupun variabel independen (X), dinyatakan reliabel. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien reliabilitas menunjukkan angka diatas 0,6, yang menunjukkan bahwa data dapat digunakan karena dianggap konsistensi.

4.3.2 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan salah satu uji yang digunakan untuk mengetahui apakah data yang akan dianalisis terdistribusi secara normal atau tidak. Uji ini juga bertujuan untuk meningkatkan penilaian dan meminimalkan sampel pada populasi.

Tabel 4. 7 Hasil Uji Normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov Test

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,94912954
Most Extreme Differences	Absolute	,066
	Positive	,066
	Negative	-,063
Test Statistic		,066
Asymp. Sig. (2- tailed)		,200 ^{c,d}

Sumber: Data diolah SPSS 26, 2025

Berdasarkan hasil analisis uji normalitas menggunakan metode One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,200, karena data dianggap berdistribusi normal apabila nilai signifikan $> 0,05$.

2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mendeteksi adanya korelasi antar variable. Multikolinieritas ini digunakan untuk menguji kenaikan ragam dari koefisien regresi terhadap variabel bebas yang orthogonal. Uji ini dilakukan dengan cara menghitung nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Nilai *tolance* $> 0,10$ dan untuk nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) < 10 .

Tabel 4. 8 Uji Multikolinieritas

Variabel	Collinerity Statistics		Hasil
	Tolerance	VIF	
Pengetahuan Wajib Pajak	0,800	1,249	Non Multikolinieritas
Kesadaran Wajib Pajak	0,964	1,037	Non Multikolinieritas
Sanksi Pajak	0,790	1,266	Non Multikolinieritas

Sumber : Data diolah SPSS 26, 2025

Hasil pengujian multikolinieritas ketiga variabel independent dapat diperoleh nilai *tolerance* $> 0,10$ dan VIF dihasilkan < 10 dengan lebih spesifik:

1. Pengetahuan Wajib Pajak dengan nilai *tolerance* $0,800 > 0,10$ dan untuk nilai VIF $1,249 < 10$ maka dapat dikatakan variabel tidak terindikasi multikolinieritas.
2. Kesadaran Wajib Pajak dengan nilai *tolerance* $0,964 > 0,10$ dan untuk nilai VIF $1,037 < 10$ maka dapat dikatakan variabel tidak terindikasi multikolinieritas.
3. Sanksi Pajak dengan nilai *tolerance* $0,790 > 0,10$ dan untuk nilai VIF $1,226 < 10$ maka dapat dikatakan variabel tidak terindikasi multikolinieritas.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam pengujian multikolinieritas pada ketiga variable independent tidak terjadi adanya multikolinieritas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual. Apabila hasil pengujian menunjukkan adanya ketidaksamaan varian dari residual pada setiap tingkat prediksi, maka hal tersebut mengindikasikan terjadinya heteroskedastisitas.

Tabel 4. 9 Uji Heteroskedastisitas menggunakan Uji Glejser

Coefficients^a					
	B	Std. Error	Beta	T	Sig.
(Constant)	4,895	1,624		3,013	,003
Pengetahuan Wajib Pajak	-,047	,049	-,107	-,972	,334
Kesadaran Wajib Pajak	-,042	,055	-,076	-,760	,449
Sanksi Pajak	-,086	,051	-,187	-1,691	,094

Sumber: Data diolah SPSS 26, 2025

Dari hasil uji heteroskedastisitas tersebut menunjukkan bahwa Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak memperoleh hasil yang signifikan karena nilai signifikan $> 0,05$ dan tidak terjadi heteroskedastisitas. Pengetahuan Wajib Pajak $0,334 > 0,05$ kemudian Kesadaran Wajib Pajak $0,449 > 0,05$ dan Sanksi Pajak $0,094 > 0,05$ maka dapat disimpulkan data tersebut tidak terjadi adanya heteroskedastisitas.

4.3.3 Analisis Regresi

Analisis regresi data ini menggunakan analisis regresi linear berganda dimana data variabel dianggap memenuhi persyaratan pada uji asumsi klasik. Uji regresi linear berganda bertujuan untuk menguji dan mengukur sejauh mana pengaruh suatu variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian ini menggunakan empat variabel bebas dimana terdapat adanya satu variabel dependen terhadap tiga variabel independen. Hasil regresi linear berganda disajikan sebagai berikut:

Tabel 4. 10 Uji Regresi Linear Berganda

Coefficient			
Model	Unstandardized Coefficients		Sig.
	B	Std. Error	
(Constant)	9,757	2,647	,000
Pengetahuan Wajib Pajak	,418	,079	,000
Kesadaran Wajib Pajak	-,057	,090	,529
Sanksi Pajak	,267	,083	,002

Sumber : Data diolah SPSS 26, 2025

Dari hasil uji regresi linear berganda yang ditampilkan pada tabel sebelumnya, dapat dirumuskan persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 9,757 + 0,418 X_1 + 0,057 X_2 + 0,267 X_3 + e$$

Hasil α dengan nilai 9,757 pada hasil uji dapat dijelaskan bahwa nilai Y Ketika X_1 , X_2 dan X_3 maka dianggap nol. Nilai 0,418, -0,057, 0,267 dapat menunjukkan seberapa besar pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. Hal ini dilakukan untuk mengukur seberapa besar kenaikan pada masing-masing variabel. Nilai e pada persamaan regresi menjelaskan kesalahan yang mungkin terjadi karena terdapat dari satu variabel yang tidak berpengaruh.

4.3.4 Uji Hipotesis

1. Uji t

Pada uji t, terdapat kriteria untuk menentukan suatu variable diterima atau ditolak dengan melihat nilai signifikan pada variable tersebut. Hasil uji t menunjukkan seberapa berpengaruh variable independen (X) dalam menjabarkan dan menjelaskan secara individual mengenai variable dependen (Y). Variabel dapat dikatakan berpengaruh positif dan signifikan apabila nilai signifikansi $< 0,05$.

Tabel 4. 11 Uji Statistik t

Coefficient				
Model	Unstandardized Coefficients		T	Sig.
	B	Std. Error		
(Constant)	9,757	2,647	3,686	,000
Pengetahuan Wajib Pajak	,418	,079	5,279	,000
Kesadaran Wajib Pajak	-,057	,090	-,632	,529
Sanksi Pajak	,267	,083	3,238	,002

Sumber: Data diolah SPSS 26, 2025

Data hasil uji t di atas dapat digunakan untuk menyusun persamaan guna menentukan nilai, dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$df = n - k - 1 \text{ (n merupakan jumlah data, k merupakan jumlah variabel X)}$$

$$df = 100 - 3 - 1 = 96$$

Nilai t tabel untuk 0,05 df adalah 1,986

Berdasarkan uji t menyatakan bahwa nilai t hitung dari variabel > t tabel dan akan dijelaskan pada masing-masing dari variabel dependen:

1. Variabel (X1) Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)

Berdasarkan dari tabel hasil uji statistik t dapat menunjukkan bahwa pada variabel (X1) t hitung sebesar $5,279 > 1,986$ t tabel dan nilai sig. dari variabel pengetahuan wajib pajak sebesar $0,000 < 0,05$ maka hipotesis pertama dapat **diterima**. Dengan hipotesis Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

2. Variabel (X2) Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)

Berdasarkan dari tabel hasil uji statistik t dapat menunjukkan bahwa pada variabel (X2) t hitung sebesar $0,632 < 1,986$ t tabel dan nilai sig. dari variabel kesadaran wajib pajak sebesar $0,529 > 0,05$ sehingga dapat dipastikan hipotesis pertama **ditolak**, dengan hasil hipotesis akhir yaitu kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

3. Variabel (X3) Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)

Berdasarkan dari tabel hasil uji statistik t dapat menunjukkan bahwa variabel (X3) t hitung sebesar $3,238 > 1,986$ t tabel dan nilai sig. dari variabel sanksi pajak $0,002 > 0,05$ sehingga dapat dipastikan hipotesis dapat **diterima**. Dengan hipotesis akhir Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

2. Uji F

Pada uji F atau uji simultan merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh secara simultan dari variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Uji F berfungsi untuk menilai apakah model regresi yang digunakan layak. Variabel dapat dikatakan berpengaruh dan signifikan apabila nilai signifikansi $< 0,05$.

Tabel 4. 12 Uji Statistik F

ANOVA^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1.	Regression	261.929	3	87.310	22.285	,000 ^b
	Residual	376.111	96	3.918		
	Total	638.040	99			

Sumber: Data diolah SPSS 26, 2025

Berdasarkan hasil uji F yang ditampilkan pada tabel di atas, pada kolom F menunjukkan angka sebesar 22,285 dengan nilai F hitung harus $> 2,70$ maka dapat dipastikan bahwa data penelitian ini berpengaruh dan signifikan. Selain itu, nilai signifikan pada tabel Sig. harus 0,000 untuk meyakinkan bahwa penelitian ini berpengaruh dan signifikan.

3. Uji Koefisien Determinasi

Hasil uji determinasi (R-Squared) diperoleh setelah data melewati uji t dan uji F. Apabila kedua uji tersebut menunjukkan pengaruh yang positif dan signifikan, maka nilai Adjusted R Square umumnya akan tinggi.

Tabel 4. 13 Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b				
Model	R	R-Square	Adjusted R Square	Std. Error Of the Estimate
1	,641 ^a	,411	,392	1,97935
a. Predictors: (Constant), Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak				
b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak				

Sumber: Data diolah SPSS 26, 2025

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi diatas dapat dilihat bahwa diperoleh nilai Adjusted R square senilai 0,392 dimana nilai koefisien determinasi berkisar antara 0-1. Uji koefisien determinasi ini melihat pada kolom adjusted R square karena variabel yang digunakan penulis saat ini berjumlah >2 variabel. Maka sudah dipastikan bahwa variabel tersebut berpengaruh dan signifikan. Semakin nilai koefisien determinasi mendekati angka 1 maka akan semakin berpengaruh dan signifikan pula variabel tersebut yang memperlihatkan bahwa keterkaitan antara variable independent dan dependen dalam model regresi yang kuat, yaitu pengetahuan wajib pajak (X1), kesadaran wajib pajak (X2), dan sanksi pajak (X3) terhadap variable dependen, yaitu kepatuhan wajib pajak (Y) dengan nilai sebesar 39,2%, sedangkan nilai sisanya 60,8% yang berarti sudah memenuhi kriteria namun karena terdapat satu variabel yang tidak berpengaruh dan tidak signifikan maka angka yang dihasilkan relative rendah. Selain itu, terdapat pengaruh dari variable lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

4.2 Interpretasi Hasil

Dari hasil uji hipotesis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, diperoleh temuan yang menggambarkan hubungan antar variabel yang diteliti sebagai berikut:

1. **H1:** Pengetahuan wajib pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor **diterima**.

Berdasarkan hasil uji t yang menunjukkan nilai t hitung lebih besar dari t tabel dengan nilai $5,279 > 1,986$. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang diteliti oleh Yuslina *et al.*, (2018), Azahra *et al.*, (2023), dan Karlina *et al.*, (2020) yang menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak

kendaraan bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajak kendaraan bermotor.

2. **H2:** Kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor **ditolak**. Berdasarkan hasil uji t yang menunjukkan t hitung lebih kecil dari t tabel di angka $0,632 < 1,986$ dengan nilai signifikan $0,529 > 0,05$. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang diteliti oleh Hermawati *et al.*, (2017), Meidiyustiani *et al.*, (2022), dan Wulandari *et al.*, (2022) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
3. **H3:** Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor **diterima**. Berdasarkan hasil uji t yang menunjukkan nilai t hitung lebih besar dari t tabel dengan nilai $3,238 > 1,986$. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang diteliti oleh Sabtiharini *et al.*, (2017), Marifah *et al.*, (2023), dan Malau *et al.*, (2021) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

4.2.1 Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan di UPPD/ Samsat Kota Semarang II kepada 100 responden wajib pajak kendaraan bermotor menghasilkan bahwa pengetahuan wajib pajak kendaraan bermotor berpengaruh dan signifikan. Dari data penelitian ini telah diolah dan pengetahuan wajib pajak kendaraan

bermotor memiliki nilai signifikansi 0,000 dimana angka tersebut $<0,05$ yang dinyatakan berpengaruh positif. Nilai t hitung lebih besar dari t tabel dengan nilai $5,279 > 1,986$ sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama **diterima** yaitu pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pengetahuan wajib pajak merupakan salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Pengetahuan wajib pajak adalah proses perubahan sikap dan tata laku wajib pajak melalui pengajaran dan pelatihan agar memahami peraturan perpajakan. Dengan adanya pendidikan formal maupun non formal mengenai perpajakan, akan meningkatkan tingkat pengetahuan wajib pajak terhadap aturan dan kewajiban perpajakan. Peningkatan pengetahuan ini berperan penting dalam mendorong wajib pajak agar patuh memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor. Sebaliknya, tanpa pengetahuan yang memadai tentang pajak dan manfaatnya, masyarakat cenderung ragu membayar pajak karena khawatir pajak yang dibayarkan disalahgunakan oleh aparat pajak, khususnya mengingat maraknya kasus penyalahgunaan di bidang perpajakan. Kondisi tersebut dapat menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor secara signifikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sehingga upaya peningkatan edukasi perpajakan menjadi sangat penting sebagai strategi untuk meningkatkan kepatuhan pajak.

Berdasarkan hasil uji yang dilakukan dalam penelitian ini, diketahui bahwa pengetahuan wajib pajak di Kantor Samsat II Kota Semarang berperan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini terjadi karena wajib pajak memiliki pemahaman yang baik mengenai pentingnya membayar pajak kendaraan. Temuan ini sejalan dengan teori atribusi, yang menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak kendaraan bermotor terhadap sistem perpajakan, prosedur pembayaran, serta konsekuensi dari ketidakpatuhan, maka semakin besar kemungkinan mereka akan memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor secara tepat waktu. Teori atribusi dalam konteks pengetahuan wajib pajak menjelaskan bagaimana individu (wajib pajak) menafsirkan penyebab atau alasan di balik perilaku mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan, termasuk kepatuhan membayar pajak. Teori ini membedakan antara faktor internal (pengetahuan wajib pajak) dan faktor eksternal (seperti pengaruh lingkungan atau sosialisasi). Pengetahuan wajib pajak dipandang sebagai faktor internal yang memengaruhi persepsi dan keputusan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Semakin baik pengetahuan wajib pajak tentang peraturan, prosedur, manfaat, dan sanksi perpajakan, maka semakin tinggi kesadaran dan kepatuhan mereka membayar pajak. Dengan demikian, hipotesis pertama pengetahuan wajib pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor **diterima**.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang diteliti oleh Yuslina *et al.*, (2018) yang menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak kendaraan bermotor berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

dalam membayarkan pajak kendaraan bermotor. Pengetahuan perpajakan merupakan sesuatu hal yang membuat kita menjadi tahu apa tujuan dan manfaat membayar pajak, kemudian apa sanksi yang akan diterima jika tidak membayar pajak. Dengan memiliki pengetahuan tentang perpajakan, maka kepatuhan wajib pajak untuk membayar kewajiban pajak mereka juga akan mengalami peningkatan. Semakin tinggi pengetahuan seseorang tentang perpajakan, maka semakin tinggi tingkat kepatuhannya dalam membayar pajak. Peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor tidak lepas dari adanya pengetahuan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini berarti apabila wajib pajak memiliki pengetahuan pajak yang baik akan cenderung patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini selaras dengan penelitian Azahra *et al.*, (2023), dan Karlina *et al.*, (2020) yang menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajak kendaraan bermotor.

4.2.2 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan di UPPD/ Samsat Kota Semarang II kepada 100 responden wajib pajak kendaraan bermotor menghasilkan bahwa kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh dan tidak signifikan dengan hasil uji t yang menunjukkan t hitung lebih kecil dari t tabel diangka $0,632 < 1,986$ dengan nilai signifikan $0,529 > 0,05$ yang artinya hipotesis pertama **ditolak** dan diperoleh hipotesis kedua kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Hasil uji yang dilakukan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa tingkat kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat II Kota Semarang tidak memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan. Hal tersebut terjadi karena tingkat kesadaran wajib pajak masih dinilai kurang terlihat dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa wajib pajak di Kantor Samsat II Kota Semarang belum memiliki kesadaran akan adanya pemenuhan hak dan kewajiban dalam membayar pajak. Namun, disamping itu masih banyak masyarakat yang lupa dan/atau lalai untuk membayar pajak sebagai bentuk pemenuhan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hasil ini mengindikasikan bahwa meskipun wajib pajak mungkin memiliki kesadaran akan pentingnya membayar pajak, faktor tersebut belum tentu mendorong tindakan nyata untuk patuh. Kemungkinan ada faktor lain yang lebih dominan dalam memengaruhi kepatuhan, seperti pengawasan, sanksi, kemudahan layanan, atau persepsi terhadap keadilan sistem perpajakan.

Kesadaran merupakan suatu bentuk kesungguhan dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Kesadaran wajib pajak atas perpajakan sangat diperlukan untuk meningkatkan kemauan wajib pajak dalam membayar pajak. Jika jumlah kendaraan bermotor mengalami peningkatan dan tidak diimbangi dengan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, maka hal ini dapat menyebabkan tunggakan dan denda yang cukup besar. Begitu sebaliknya, jika semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang diteliti oleh Hermawati *et al.*, (2017) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sadar atau tidak sadarnya wajib pajak kendaraan bermotor terhadap perpajakannya, tidak akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal itu karena pajak merupakan kewajiban yang harus di bayarkan oleh wajib pajak, selain itu pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang akan digunakan negara untuk pembangunan dan kepentingan masyarakat. Wajib pajak hanya mematuhi apa yang menjadi kewajibannya yaitu membayar pajak, tetapi wajib pajak belum sadar perihal pajak yang dibayarkan akan digunakan untuk apa. Kesadaran wajib pajak merupakan faktor internal dalam teori Atribusi. Berdasarkan teori atribusi atau teori pola pikir dan tingkah laku manusia berkaitan terhadap kesadaran wajib pajak dimana dapat menggambarkan bahwa pola pikir dan tingkah laku manusia dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak. Kesadaran akan kewajibannya dalam hal perpajakan merupakan faktor penting dalam melaksanakan *self assessment*. Seorang wajib pajak harus sadar dalam memahami, mentaati dan memiliki kesungguhan hati untuk memenuhi kewajiban ketentuan perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini selaras dengan penelitian Meidiyustiani dan Wulandari (2022) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Denpasar.

4.2.3 Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan di UPPD/ Samsat Kota Semarang II kepada 100 responden wajib pajak kendaraan bermotor menghasilkan bahwa sanksi pajak berpengaruh dan signifikan. Dari data penelitian ini telah diolah dan pengetahuan wajib pajak memiliki nilai signifikansi 0,000 dimana angka tersebut $< 0,05$ yang dinyatakan berpengaruh positif. Nilai t hitung lebih besar dari t tabel dengan nilai $3,238 > 1,986$ sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama **diterima** yaitu sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan hasil uji yang dilakukan dalam penelitian ini, diketahui bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh serta berperan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penerapan sanksi yang tegas, seperti denda keterlambatan, razia pajak kendaraan, atau penghapusan sementara STNK, terbukti menjadi faktor pendorong bagi wajib pajak untuk taat membayar pajak. Masyarakat menjadi lebih disiplin karena adanya konsekuensi nyata jika melanggar. Penegakan sanksi yang konsisten dan jelas dapat memberikan efek jera kepada wajib pajak, sehingga mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini sejalan dengan teori atribusi, yang menyatakan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Dalam konteks ini, sanksi pajak merupakan faktor eksternal yang dapat memengaruhi perilaku wajib pajak dalam membayar pajak.

Adanya pengaruh eksternal seperti ancaman sanksi, serta program pemerintah seperti pembebasan denda atau pemutihan pajak, menunjukkan bahwa situasi dan kebijakan yang diterapkan oleh otoritas pajak dapat membentuk persepsi wajib pajak terhadap kepatuhan. Program pembebasan sanksi, menjadi strategi yang tidak hanya meringankan beban, tetapi juga meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab wajib pajak untuk lebih taat terhadap ketentuan perpajakan dan sanksi yang berlaku.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang diteliti oleh Sabtiharini *et al.*, (2020) menyatakan bahwa sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan akan dipatuhi. Sanksi pajak merupakan alat pencegah preventif agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi pajak dikenakan pada seseorang wajib pajak bila melakukan keterlambatan pelanggaran. Dengan adanya sanksi maka pemerintah mempunyai dasar yang kuat untuk menjaring wajib pajak yang melakukan pelanggaran pajak. Sanksi pajak kendaraan bermotor berupa sanksi administratif. Penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan perpajakan bertujuan untuk mengurangi perilaku yang tidak diinginkan, sehingga dapat mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi persepsi baik wajib pajak atas sanksi perpajakan, maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Demikian pula sebaliknya, semakin rendah persepsi baik wajib pajak atas sanksi perpajakan, maka semakin rendah pula kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Penelitian ini selaras dengan penelitian Marifah *et al.*, (2023), dan Malau *et al.*, (2021) yang

menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.